

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan Nasution, A., Mardiana, S. and Isnaini, dan (2018) ‘Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementation of Mayor of Binjai Regulation Number 47 of 2017 Concerning the System and Procedure of Collecting Rural and Urban Land and Building Taxes and their Relation to Intensification Revenue in Binjai City’, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), pp. 52–64.
- GFallis, A. (2013) ‘Teori Kebijakan Implementasi’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Oktasari, D. (2015) ‘Implementasi kepmen pan no. 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik di kantor kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara’, 3(63), pp. 1339–1353.
- RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang ubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/Undang-Undang-no-1-tahun-2022>
- RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46963/Undang-Undang-no-12-tahun-1985>
- RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/Undang-Undang-no-32-tahun-2004>
- RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/Undang-Undang-no-23-tahun-2014>
- RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

- Perpajakan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/Undang-Undang-no-28-tahun-2007#:~:text=UNDANG-UNDANG%20No.%2028%20Tahun%202007,Cara%20Perpajakan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/Undang-Undang-no-16-tahun-2019>
- RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46237/Undang-Undang-no-12-tahun-1994>
- RI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40503/Undang-Undang-no-10-tahun-2004#:~:text=UNDANG-UNDANG%20No.%2010%20Tahun%202004,%20Undangan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/Undang-Undang-no-12-tahun-2011>
- RI, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen tentang UUD 1945 dan Amandemen. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->
- RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008>
- RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4760/pp-no-38-tahun-2007#:~:text=PP%20No.%2038%20Tahun%202007,Kabupaten%20Kota%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

- RI, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2033%20tahun,Hasil%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah.>
- RI, Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/210560/perwali-kota-semarang-no-42-tahun-2008>
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016>
- Siahaan, Marihot P. (2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marihot, Siahaan.(2005). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Suharno, E. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik.
- Tjiptono, F. (2007). Strategi Pemasaran Edisi ke dua, penerbit Andi. Yogyakarta. *Rahayu Somalua, Asim, Nurminingsih, Robert Siregar.*
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.* Bumi Aksara.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik.* PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik.* Media Pressindo.
- Zamrodah, Y. (2016) 'Teori Pajak', 15(2), pp. 1–23.
- Adelina, R. (2013) 'Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik', *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), pp. 1–20.
- Ibnu Afandi, M. and Warijo (2015) 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target

- Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)', *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), pp. 92–113.
- Ma'ruf, M.H. and Supatminingsih, S. (2020) 'Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). Available at: <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>.
- Rahmat, D. (2017) 'Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 35–42. Available at: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>.
- Saputri, E., Hakim, A. and Noor, I. (2015) 'Implementasi Kebijakan Pemungutan Pbb – P2 Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), pp. 432–442. Available at: www.publikasi.unitri.ac.id.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Lexy J. Moleong (penulis). (2018). *Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.*. Bandung :: PT Remaja Rosdakarya,.
- Munandar, Utami. 2012. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Rahayu, K. W. (2017). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Ekonomia*, 6(1), 177-182.
- Widiastuti, L., Widodo, E., & Widowati, A. (2016). Perbandingan Penerapan Model Problem Based Learning Dan Model Group Investigation Pada Pembelajaran IPA Dalam Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah. *Pend. Ilmu Pengetahuan Alam-S1*, 5(8).
- Wulan, R. S., & Fanida, E. H. (2015). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.